

# Strategi Kebijakan Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilisasi Inflasi Jangka Menengah

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2021

**Dr. Iskandar Simorangkir, SE., MA.**

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  
Selaku Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Jakarta, 28 Oktober 2021

# OUTLINE

1. Perkembangan Ekonomi Terkini
2. Respon Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi dan Mendorong Pemulihan Ekonomi
3. Perkembangan Inflasi dan Strategi Kebijakan Jangka Menengah

---

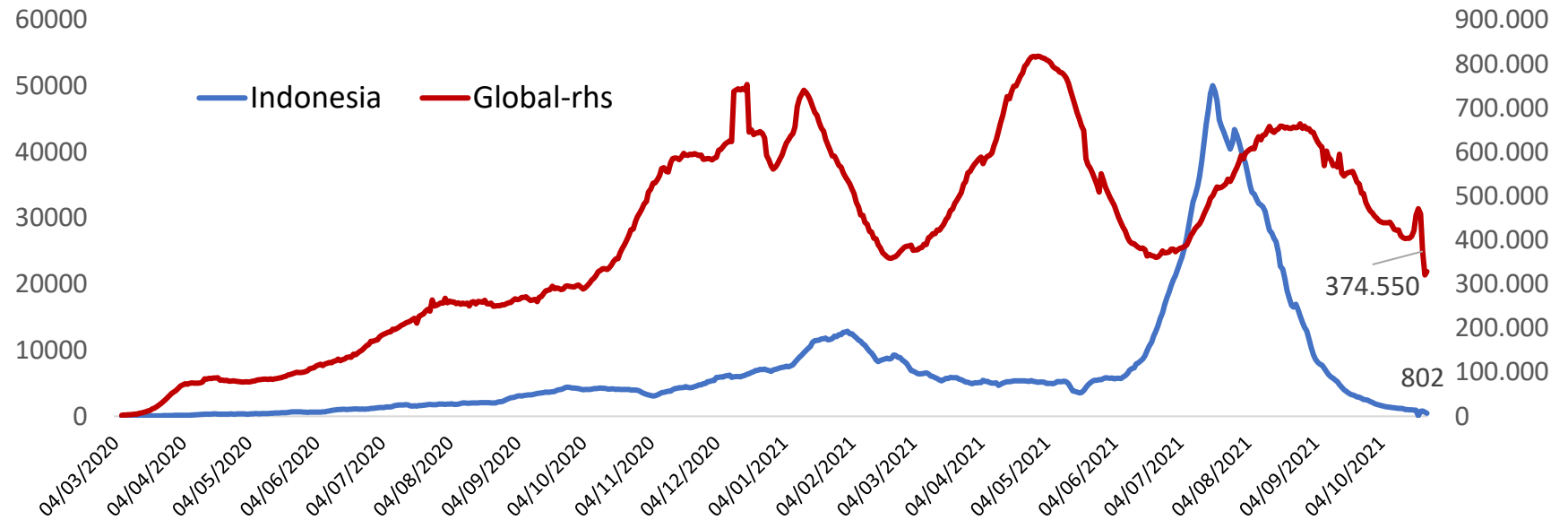
# Perkembangan Ekonomi Terkini

# KASUS COVID-19 INDONESIA MENURUN MELEWATI PUNCAK GELOMBANG KEDUA

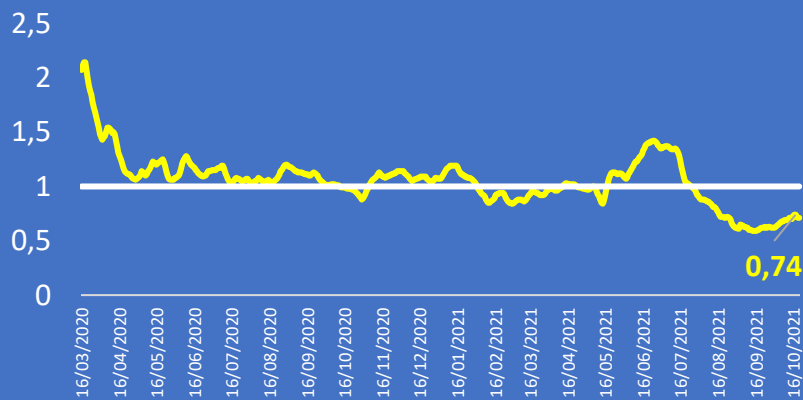
- Berbagai indikator menunjukkan perbaikan setelah Indonesia melewati puncak gelombang kedua covid-19. Kasus aktif Indonesia menurun dari 574 ribu (24 Juli-21) menjadi 13,35 ribu (25 Okt-21)
- Strategi penanganan covid dari hulu ke hilir dinilai efektif menurunkan kasus aktif, kematian, dan reproduction rate

	Indonesia	Global
Kasus Aktif	13,35 ribu	17,9 juta
Sembuh	4,1 juta (96,3%)	221 juta (98%)
Meninggal	143,2 ribu (3,4%)	4,9 juta (2,0%)

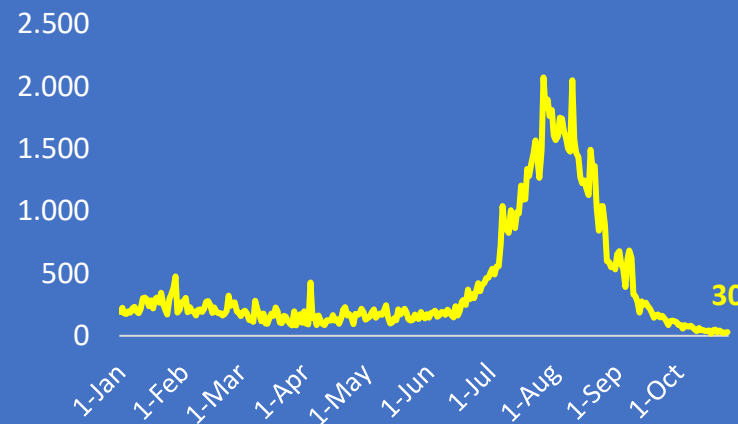
### Kasus Konfirmasi Harian Covid Indonesia vs Global (MA7)



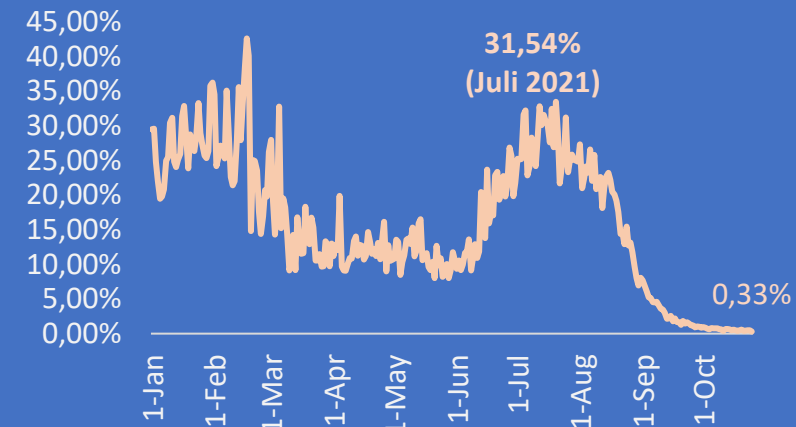
### Covid-19 Reproduction Rate



### Kematian Harian

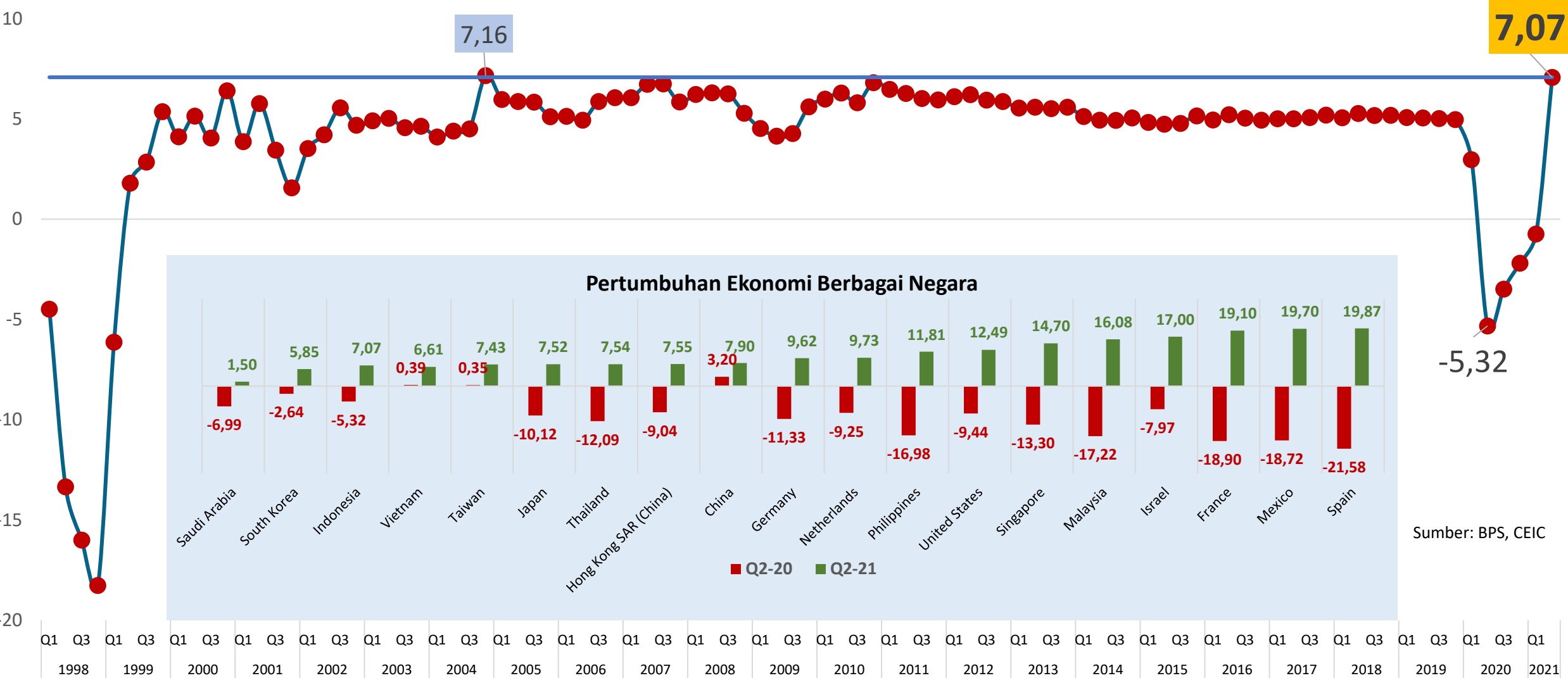


### Positive rate (%)



# PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Q2-2021, TERTINGGI DALAM 16 TAHUN TERAKHIR

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2021 mencapai 7,07%(YoY) merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak 16 tahun terakhir (capaian 7,16% terjadi pada Q4-2004). Selain ada faktor base effect, sejumlah leading indicator menunjukkan perbaikan dan pemulihan ekonomi ini diharapkan akan terus berlanjut

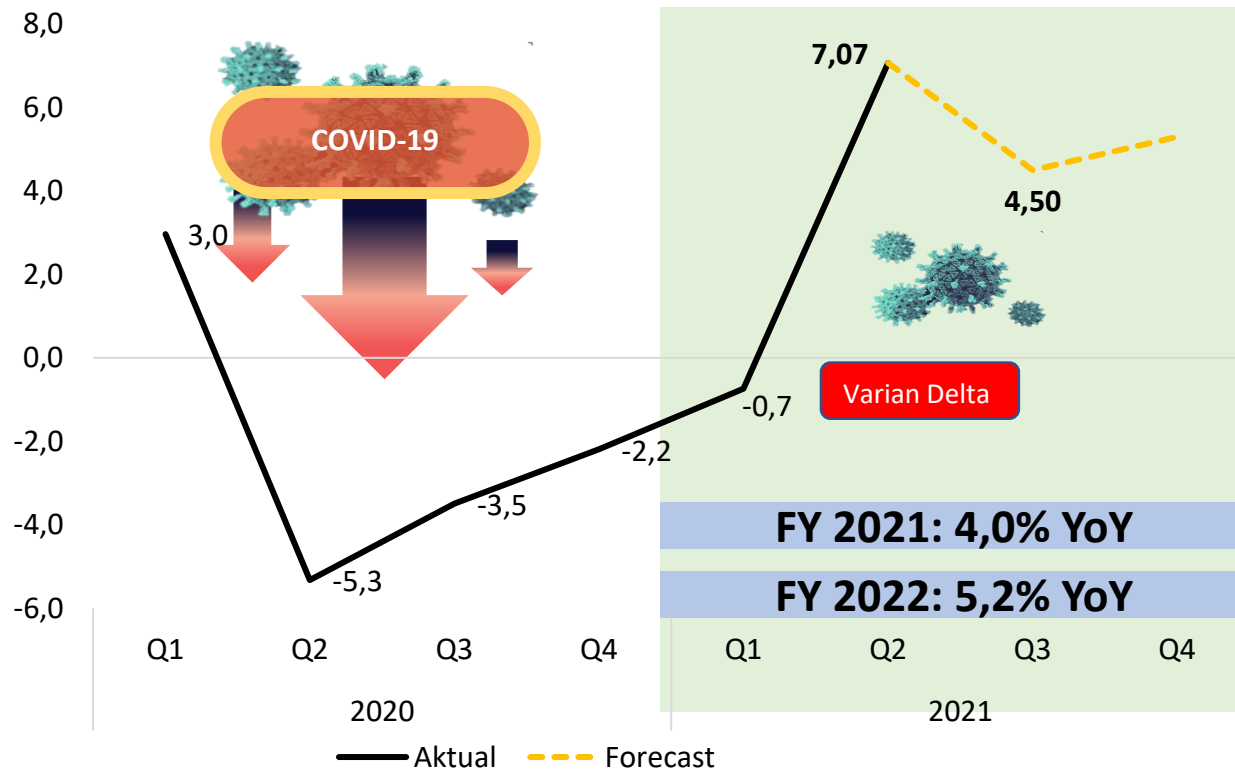


Sumber: BPS, CEIC

# KINERJA EKONOMI TAHUN 2021 DAN 2022 DIPROYEKSIKAN MASIH TUMBUH POSITIF SEJALAN DENGAN EKSPEKTASI PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL

- Dampak lonjakan kasus variant delta telah berhasil diatasi sehingga aktivitas ekonomi segera pulih di Bulan September 2021 dan membuat ekonomi diproyeksikan tumbuh sebesar 4,5% YoY di Q3-2021. Momentum pemulihan ekonomi akan kembali menguat di Q4-2021 yang membuat ekonomi diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 4,0% YoY di tahun 2021.
- Dalam jangka menengah, reformasi struktural akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur alami sebelum pandemi dan pada saat yang sama mengarah pada pencapaian visi "Indonesia Maju 2045". Reformasi struktural akan diarahkan pada peningkatan peran investasi dan ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% YoY)



## Asumsi Makro Jangka Menengah 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%YoY)	5,3 – 6,1	5,4 – 6,3	5,5 – 6,5
Inflasi(%YoY)	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13,800 – 15,000	13,600 – 15,000	13,500 – 15,000

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2022

---

# Respon Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi dan Mendorong Pemulihan Ekonomi

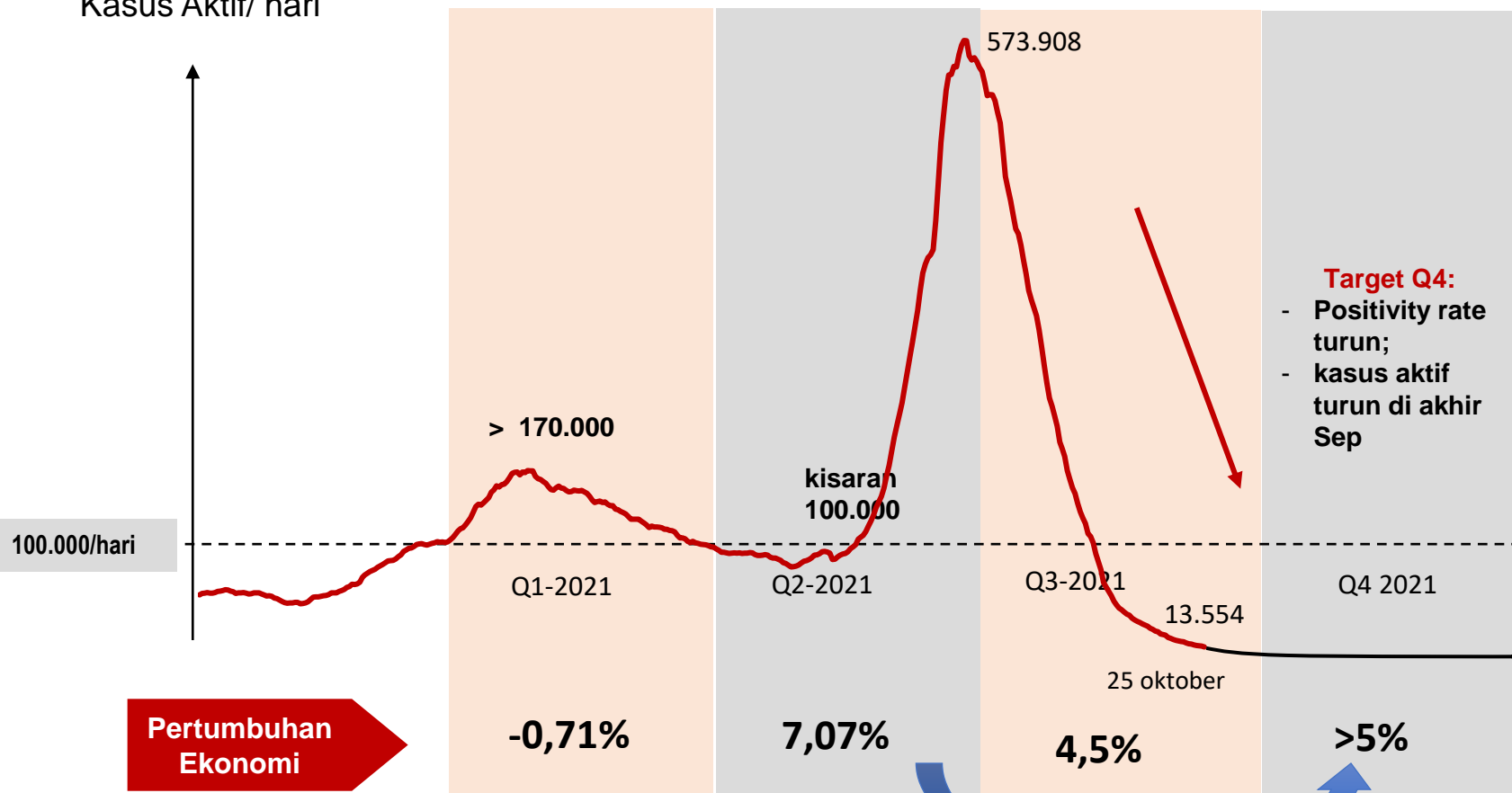
# TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN BERGANTUNG PADA EFEKTIVITAS PENANGANAN COVID-19

Target Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 disepakati sebesar **5,2 persen**. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada penanganan Covid-19 (Program PEN) serta berbagai faktor lainnya.

## Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 4%

## Pertumbuhan 2022

Kasus Aktif/ hari



**Pertumbuhan Ekonomi** akan sangat tergantung kepada:

- 1) Pengendalian Pandemi** secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan
- 2) Respons kebijakan ekonomi** yang tepat (termasuk Fiskal dan Moneter), untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat.
- 3) Penciptaan Lapangan Kerja** secara signifikan dan kesiapan **ber-transformasi** (teknologi digital) ke masa depan.



# STRATEGI PENANGANAN COVID-19: HULU (PENCEGAHAN) & HILIR (PENANGANAN)

## PENCEGAHAN (STRATEGI HULU)

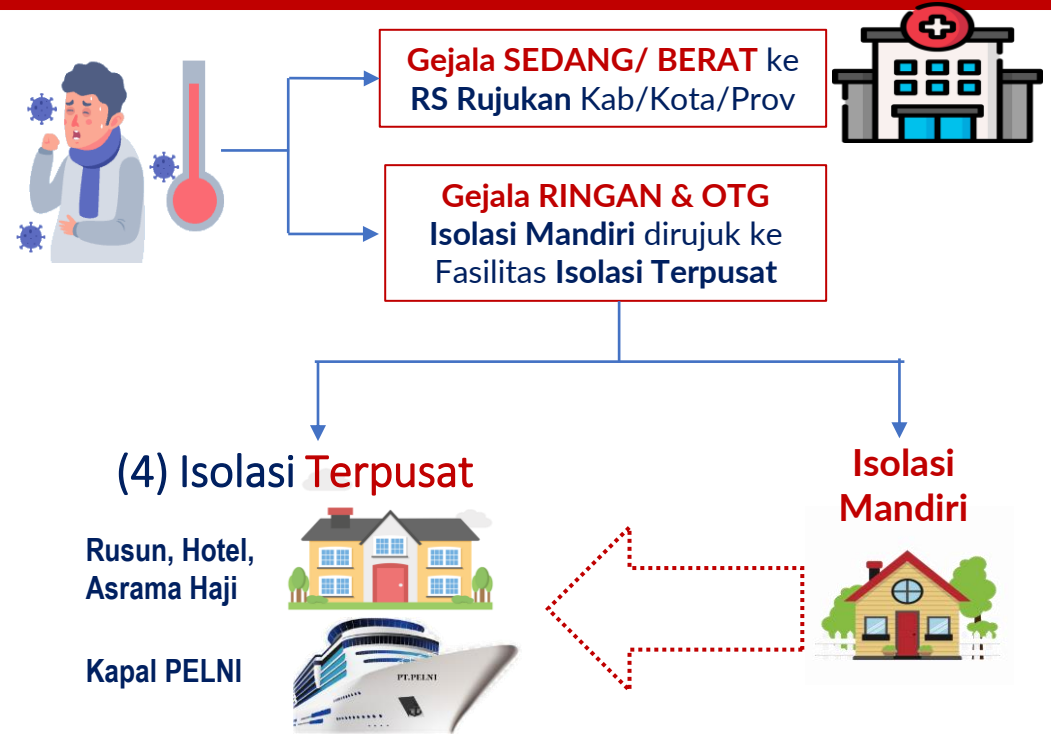
- 

(1) Peningkatan Percepatan **Vaksinasi**
- 

(2) Peningkatan Jumlah *Testing & Tracing*
- 

(3) Pembatasan Mobilitas (**PPKM**)

## PENANGANAN (STRATEGI HILIR)



# DUKUNGAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL UNTUK MENJAGA DAYA BELI MASYARAKAT DI TENGAH PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT DAN UNTUK MENOPANG PEMULIHAN EKONOMI

Desil Pendapatan Masyarakat	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu Sembako	Diskon Listrik	Bantuan Sosial Tunai	BLT Desa*	Bantuan Beras Bulog	Kartu Sembako PPKM	Kartu Pra Kerja	Bantuan Subsidi Upah	Subsidi Kuota Internet
6+								5,6 juta Orang + 336 Rb Orang**	8,8 Juta sektor non kritikal di PPKM level 3 dan Level 4	38,1 Juta Penerima
5			32,6 Juta Rumah Tangga	10 juta Keluarga	8 juta Keluarga	28,8 Juta Keluarga (BST dan Kartu Sembako)	5,9 juta Keluarga usulan Pemda			PAUD (7GB/bln), siswa SD-SMA (10GB/bln), Mahasiswa (15GB/bln), Guru (12GB/bln), dan Dosen (15GB/bln), 1 GB sebesar Rp2.750
4										
3				Rp300 rb/bln	Rp300 rb/bln					
2	10 juta Keluarga	18,8 juta Keluarga Rp200rb/bln	RT 450 VA, diskon 100% pada Jan-Mar, 50% pada Apr-Des			10 kg/Keluarga	Rp200 Rb/Bulan	Pra Kerja Pelatihan: Rp1 jt Insentif: Rp600 rb/bln Survei (3x): Rp50 rb	Merupakan peserta aktif BP Jamsostek	
1	Per Tahun: Hamil dan Anak Usia Dini Rp3 Jt, SD Rp900rb, SMP Rp1,5 Jt, SMA Rp 2 Jt, Disabilitas dan Lansia Rp2,4 Jt	Juli dan Agustus dibayarkan dua kali	RT 900 VA, diskon 50% pada Jan-Mar, 25% pada Apr-Des	DTKS di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja		di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, dan BST	di luar DTKS dan BSU	BSU: Rp1 Juta/Pekerja	Peserta dan Tenaga Ddidik
Jangka Waktu	bulanan selama 12 bulan	bulanan selama 12 bulan + 2 bulan	9 Bulan (Jan-Sept) + 3 Bulan (Okt-Des)	6 bulan	12 bulan (Jan-Des)	Sekali Penyaluran pada Juli	6 bulan (Jul-Des)	Insentif untuk 4 bulan	Sekali Penyaluran	10 bulan (Jan-Mei + Agt-Des)
Alokasi + Tambahan (Rp T)	28,31	43,37 + 7,52 = 49,89	7,58 + 1,91 = 9,49	17,46	28,8	3,58	7,08	20 + 1,2 = 21,2	8,8	3 + 5,54 = 8,54

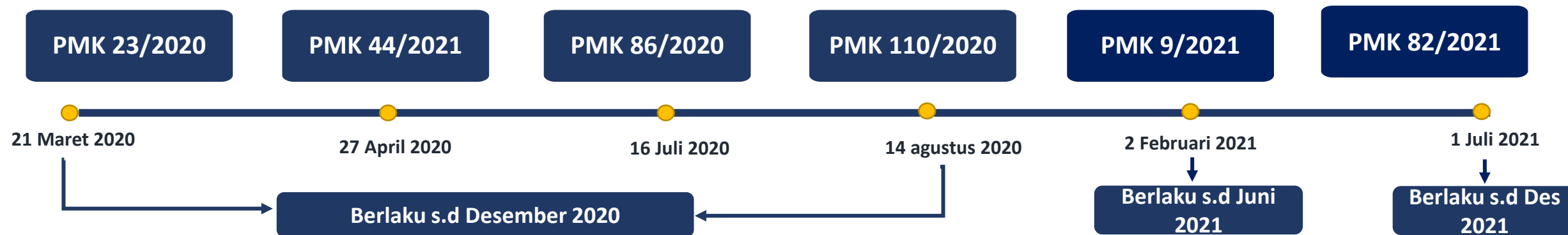
\*dilakukan relaksasi targeting KPM BLT Desa dengan memberikan kewenangan lebih pada Kepala Desa

\*\*angka estimasi

Warna Merah: Tambahan Program

# INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19

Dalam rangka mendukung eksistensi dan keberlangsungan dunia usaha yang terdampak Covid-19, Pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-2019 yang diatur dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah/diganti beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 82 Tahun 2021 dan berlaku sampai dengan Desember 2021.



## Cakupan Insentif:



### PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 (atas upah/gaji) dari pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta setahun.



### Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Importir/Wajib Pajak eligible dibebaskan dari pungutan PPh Pasal 22 Impor pada saat melakukan impor barang



### Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Bagi Wajib Pajak yang eligible diberikan pengurangan angsuran bulanan PPh pasal 25 sebesar 50%.



### Percepatan Restitusi PPN

Bagi Wajib Pajak yang eligible dengan nilai lebih bayar PPN hingga Rp5 miliar diberikan percepatan pengembalian (restitusi) PPN dalam waktu 1 bulan (normalnya 12 bulan)



### PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah,

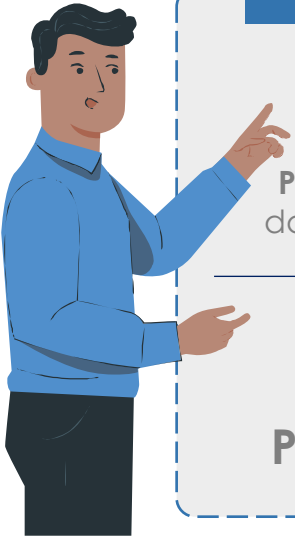
Pemerintah menanggung PPh final 0,5% yang menjadi kewajiban para pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu



### PPh Final Ditanggung Pemerintah

PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)

# KARTU PRAKERJA SEBAGAI SEMI-BANSOS SELAMA PANDEMI, SEKALIGUS MENDORONG PENGEMBANGAN SDM



**Pendaftaran**

>76 Juta

Pendaftar di situs Kartu Prakerja dari SEMUA Kabupaten dan Kota

---

34

Provinsi

514

Kab/Kota

**Penerima**

5.900.459

Penerima Kartu Prakerja (Batch 12-21)\*\*

---

5.878.636

(99% penerima)  
Penerima telah menyelesaikan pelatihan

5.498.440

(93% penerima)

Penerima Telah mendapatkan insentif

---

Rp 9,57 T

Total Insentif  
Telah disalurkan

\*\* Jumlah penerima efektif setelah jumlah SK penerima (5.973.372 orang) dikurangi jumlah yang dicabut kepesertaannya (72.913 orang)

**SEMI-BANSOS:**

Memberi keterampilan sekaligus melindungi daya beli

90,9%

Keterampilan kerja peserta meningkat (\*TNP2K)

95%

Insentif dipakai untuk membeli bahan pangan (\*Survei Evaluasi)

98%

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill* (\*Survei Evaluasi)

**EMPLOYMENT:**

Mendorong keberkerjaan, termasuk kewirausahaan

39,8%

Status menganggur mengalami penurunan setelah mengikuti program (Survei Evaluasi)

93%

Pelatihan mendorong kewirausahaan (Survei Evaluasi)

**INKLUSIF:**

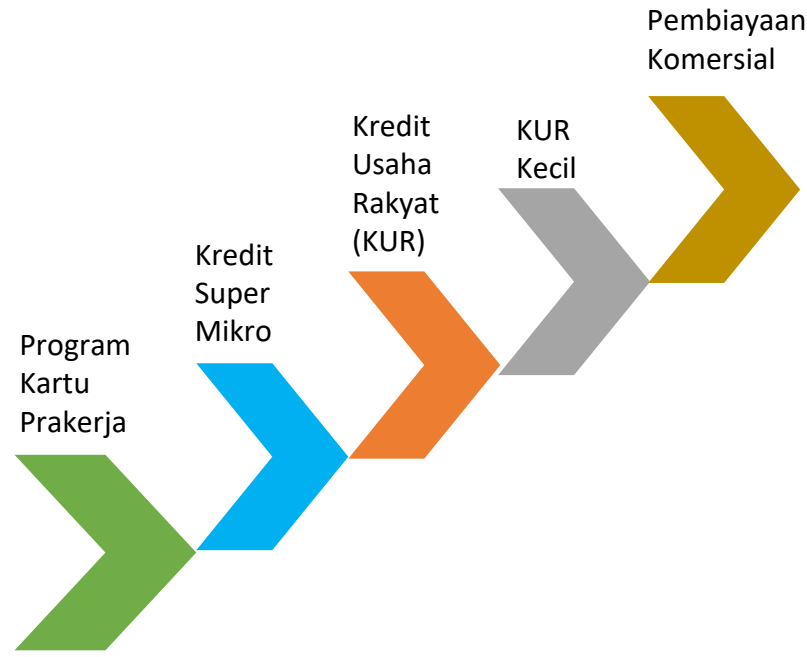
Menjangkau seluruh lapisan masyarakat

27%

Penerima yang tidak memiliki rekening/e-wallet sebelum mengikuti program telah memiliki rekening/e-wallet setelah program. (Survei Evaluasi)

## Integrasi Program Kartu Prakerja dengan Pembiayaan UMKM

Melalui dukungan pembiayaan usaha, masyarakat yang telah lulus Program Kartu Pra Kerja dan mendapatkan pelatihan dapat memulai usaha. Integrasi program ini diharapkan dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penguatan pelaku UKM.



**Tahapan Kelulusan Penerima Program Kartu Pra Kerja ke Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Sumber: Manajemen Pelaksana 18 Oktober 2021



# Program BPUM dan Bantuan PKL (BLTUM\*)

Realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) hingga September 2021 : Rp 15,24 Triliun untuk 12,7 juta pelaku usaha mikro (99,2% dari total anggaran Rp15,36 T)



**BANTUAN SELAMA TAHUN 2021: Rp16,56 T**



**Alokasi BPUM  
Rp15,36 T**



**Alokasi Bantuan PKL  
Rp1,2 T**

Indeks bantuan Rp1,2 juta @ Usaha untuk BPUM dan Bantuan PKL

## Penerima BPUM 2020 berdasarkan Lapangan Usaha

Survei Bersama Kemenkop UKM dan TNP2K – Des 2020

Sektor Lapangan Usaha	Proporsi (%)	Jenis Usaha
Perdagangan eceran	37,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makanan, minuman atau tembakau di pasar tradisional</li> <li>Pakaian</li> <li>Roti, kue kering, serta kue basah</li> </ul>
Penyediaan makanan dan minuman	16,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warung makan</li> <li>Kedai makanan dan minuman</li> <li>Penyediaan makanan keliling</li> </ul>
Industri makanan dan minuman	14,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri kue basah</li> <li>Industri makanan dan masakan olahan</li> <li>Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya</li> </ul>
Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan	9,7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembibitan dan budidaya kambing potong</li> <li>Budidaya ayam ras pedaging</li> <li>Pertanian padi inbrida</li> </ul>
Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	5,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan</li> <li>Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga</li> <li>Industri kain tenun ikat</li> </ul>
Reparasi <i>handphone</i> (HP) dan jual pulsa	2,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servis <i>handphone</i></li> <li>Jual pulsa</li> </ul>
Reparasi atau perawatan mobil dan sepeda motor	1,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparasi dan perawatan sepeda motor</li> <li>Reparasi mobil</li> <li>Pencucian mobil</li> </ul>
Jasa binatu	1,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa binatu</li> </ul>
Salon dan pangkas rambut	0,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pangkas rambut</li> <li>Salon kecantikan</li> </ul>
Lainnya	9,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi</li> <li>Pembuat produk kerajinan</li> </ul>

*Penerima BPUM 2020 didominasi oleh sektor HOREKA*

n: 1.262

Penerima BPUM 2020: 12 Juta Usaha

\*BLTUM: Program Bantuan Langsung Tunai Pelaku Usaha Mikro (BLTUM) untuk pedagang kaki lima dan warung

# Program PEN: Bantuan Tunai untuk PKL & Warung (BT-PKLW)

## RINGKASAN

- **Bentuk:** program Bantuan Tunai kepada 1.000.000 PKL dan Pemilik Warung, yang disalurkan melalui **POLRI dan TNI**.
- **Anggaran dan Besaran Manfaat:**
  - Setiap PKL/W akan menerima Uang Tunai sebesar @Rp1.200.000
  - Disalurkan melalui DIPA POLRI dan TNI masing-masing @600M.
- **Kriteria Penerima:**
  - PKL dan Pemilik Warung yang bukan Penerima/ Calon Penerima BPUM;
  - *Lokasi usaha berada pada Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 201*
- **Kriteria Pengalokasian** per daerah secara proporsional berdasarkan Populasi Penduduk dan Data PKL dan warung dari Dinas KUKM Kab/Kota.
- **Mekanisme dan Sistem Penyaluran:** (i) Pendataan; (ii) Penetapan Calon Penerima; (iii) Penyerahan dana secara tunai di Polres atau Kodim.

TUP : Tambahan Uang Persediaan  
SPM : Surat Perintah Membayar  
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

## PELAKSANAAN



POLRI



KEMENKEU



TNI

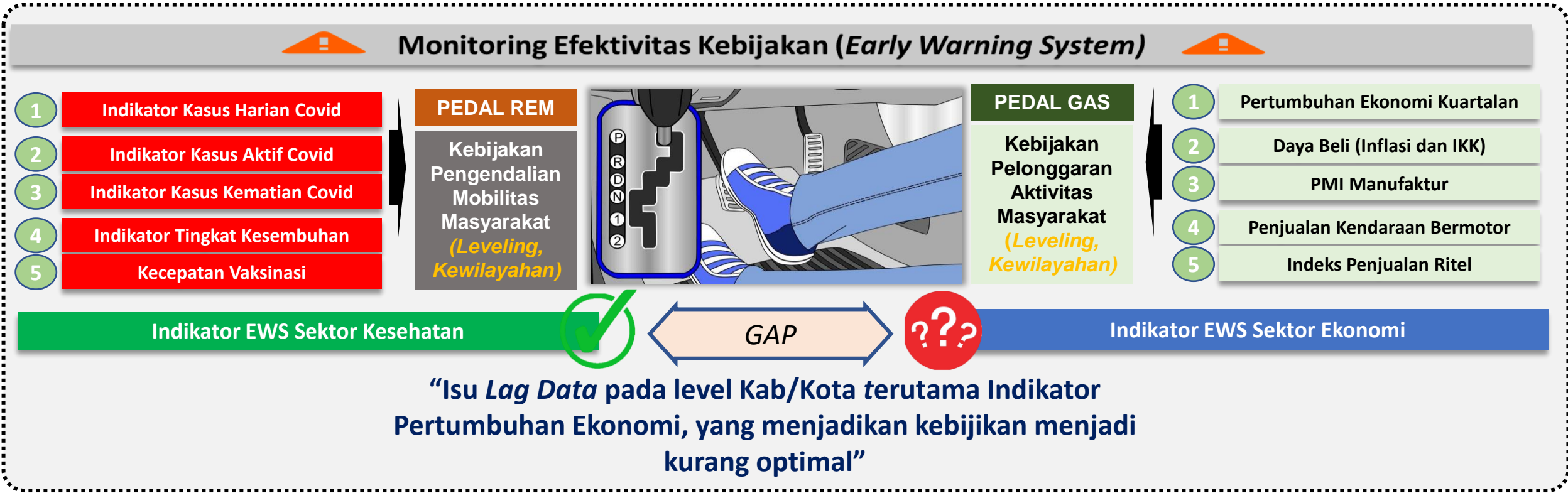
*Alokasi: Rp 600 Milyar  
Untuk 500 ribu penerima*

*Alokasi: Rp 600 Milyar  
Untuk 500 ribu penerima*



Kick-off ujicoba pelaksanaan BTPKLW di  
Kota Medan  
9 September 2021

# Percepatan Pemulihan Ekonomi Memerlukan Indikator *Early Warning System* Sebagai Gambaran Progres Pemulihan maupun Dasar Penajaman Insentif Kebijakan Yang Terarah



**Surat Menko Perekonomian kpd TPID Provinsi**



- 1** Pemantauan Indikator Ekonomi Daerah (*Early Warning System*) yang Akurat dan Terkini utk Memantau Denyut Perekonomian di Daerah
- 2** Mengidentifikasi dan Mengoptimalkan Sumber-sumber Pertumbuhan Daerah a.l Melalui Optimalisasi Rantai Nilai Lokal

# Beberapa daerah yang telah melakukan pemantauan melalui EWS indikator ekonomi daerah

## PROVINSI DIY

Periode	Indeks Penjualan Ritel	Konsumsi Semen ton	Listrik Rumah Tangga KWh	Listrik Industri KWh	Data Kendaraan	
					Motor (baru)	Mobil (baru)
2021 1	87.62	81,238	162,127,115	21,446,414	7,590	1,032
2	83.35	80,699	132,035,345	19,898,354	6,672	768
3	88.12	100,740	148,052,327	22,602,559	6,692	798
4	88.98	98,484	141,780,124	22,261,878	7,648	944
5	88.7	67,828	149,868,485	19,955,887	6,550	735
6	85.96	107,302	214,641,258	22,945,261	6,971	800
7		105,158	144,735,542	20,723,550	6,022	740

## PROVINSI PAPUA

SUMBER DATA	INDIKATOR	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mei-21	Jun-21	Jul-21	LINGKUP	SATUAN	
		Survei Pedagang Eceran	Penjualan sepeda motor motorcycle sales	7,461	4,817	5,600	4,476	3,975			5,946
	Penjualan ritel kendaraan bermotor (mobil)	25,547	20,228	23,022	24,224	16,599	25,813		Kota Jayapura	Nilai dalam Jutaan	
	Pejualan Ritel	87,655	75,233	81,461	83,870	75,734	86,390		Kota Jayapura	Nilai dalam Jutaan	
ASI-Data Realisasi Pengadaan Semen	Konsumsi Semen	48743.51	51597.47372	51225.62561	49780.67137	49114.4169	57220.99207	52103.18	Provinsi Papua	Jumlah dalam tonase	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Konsumsi Listrik	469,433	471,207	472,969	474,594	475,410	477,699	479,450	Provinsi Papua	Jumlah dalam unit	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Rumah Tangga	73,119,728	55,582,099	55,177,212	56,375,666	59,650,563	62,071,313	57,882,812	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Industri	905,254	797,577	923,161	955,040	947,406	997,750	1,041,016	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Bisnis	25,268,496	22,516,374	24,951,015	24,642,870	25,050,693	25,051,893	24,645,592	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Sosial	5,191,229	4,608,606	5,201,431	5,353,967	5,406,655	5,396,321	5,427,881	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Kantor Pemerintahan	6,955,539	6,206,859	6,773,873	6,821,818	6,425,319	6,735,339	7,619,798	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	PJU	961,152	922,542	973,578	990,498	983,399	993,689	1,009,218	Provinsi Papua	Kwh	
PLN-Data Pelanggan dan Energi	Total Penggunaan Listrik	112,401,399	90,634,057	94,000,270	95,139,859	98,464,035	101,246,305	97,626,317	Provinsi Papua	Kwh	
Suvei Konsumen KPwBI Papua	KEYAKINAN KONSUMEN	1. Kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Provinsi Papua	Indeks
		2. Perkiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini	164.67	151.33	166.67	155.33	150.67	162.67	110.67	Provinsi Papua	Indeks
		3. Penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu	120.67	96.67	124.67	109.33	129.33	116.67	98.00	Provinsi Papua	Indeks
		4. Perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini	146.67	135.33	148.67	144.00	148.67	144.00	116.00	Provinsi Papua	Indeks
		5. Ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu	114.67	110.00	114.00	118.00	132.00	112.00	91.33	Provinsi Papua	Indeks
		6. Perkiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini	160.00	139.33	150.00	137.33	156.00	144.67	104.67	Provinsi Papua	Indeks
		7. Konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu	107.33	102.00	95.33	109.33	111.33	96.67	104.00	Provinsi Papua	Indeks
		99a. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	114.22	102.89	111.33	112.22	124.22	108.44	97.78	Provinsi Papua	Indeks
		99b. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	157.11	142.00	155.11	145.56	151.78	150.44	110.44	Provinsi Papua	Indeks
		99c. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	135.67	122.44	133.22	128.89	138.00	129.44	104.11	Provinsi Papua	Indeks
KONDISI KEUANGAN KONSUMEN DAN AKSES KE PERBANKAN	1. Perkiraan Pengeluaran untuk konsumsi 3 bulan mendatang dibandingkan saat ini	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Provinsi Papua	Indeks	
		2. Perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Provinsi Papua	Indeks



# Program PC-PEN Akan Terus Berlanjut Di Tahun 2022

Untuk Mengantisipasi Perluasan Dampak Covid-19 & Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

## Tahun 2021 (s.d. 22 Oktober 2021)

### KESEHATAN

Pagu Rp.214,96 T

Realisasi Rp.116,82 T (54,3%)

### PERLINDUNGAN SOSIAL

Pagu Rp.186,64 T

Realisasi Rp.125,10 T (67%)

### DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Pagu Rp.162,40 T

Realisasi Rp.63,20 T (38,9%)

### PROGRAM PRIORITAS

Pagu Rp.117,94 T

Realisasi Rp.68,07 T (57,7%)

### INSENTIF USAHA

Pagu Rp.62,83 T

Realisasi Rp.60,73 T (96,7%)

## Tahun 2022

### Potensi Risiko Peningkatan Dampak COVID-19 di Tahun 2022:

- Peningkatan *testing, tracing, dan treatment*
- Peningkatan klaim pasien seiring meningkatnya jumlah kasus
- Perluasan perlindungan masyarakat



Alokasi Program PEN berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan COVID-19

### KESEHATAN:

**Rp 77,05 T**

### PROGRAM PRIORITAS:

**Rp 90,04 T**

### PERLINDUNGAN MASYARAKAT:

**Rp 126,54 T**

### DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI:

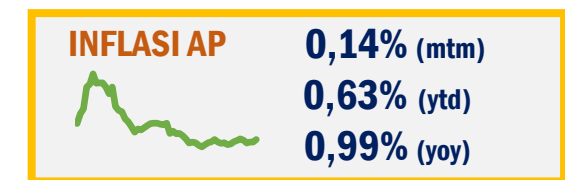
**Rp 27,48 T**

---

# Perkembangan Inflasi dan Strategi Kebijakan Jangka Menengah

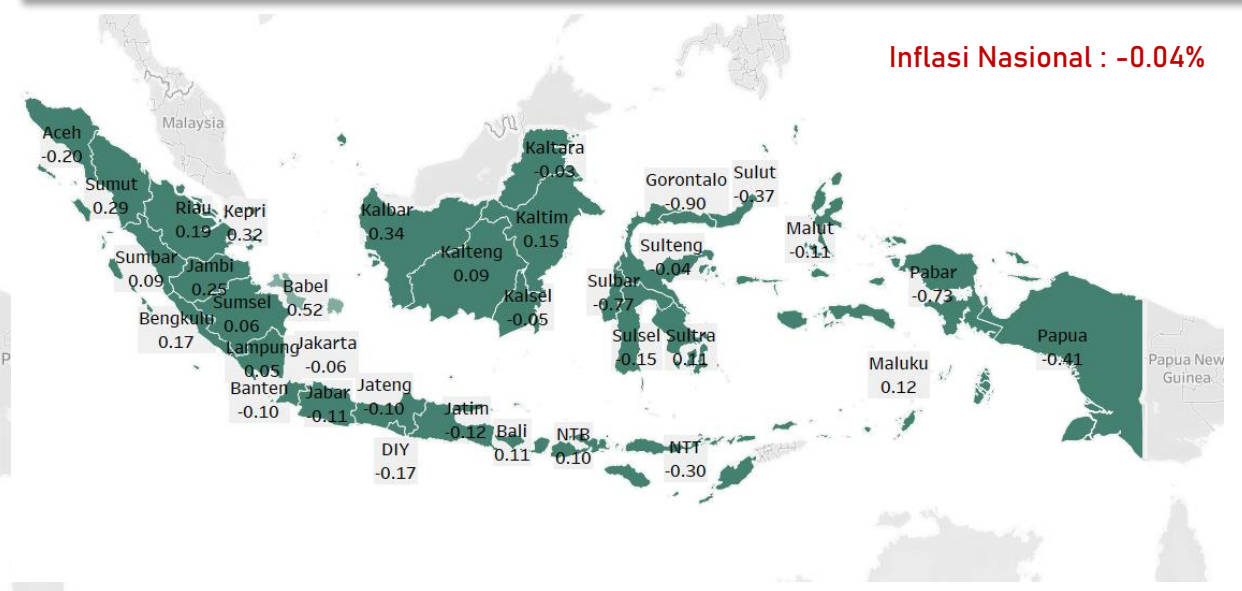
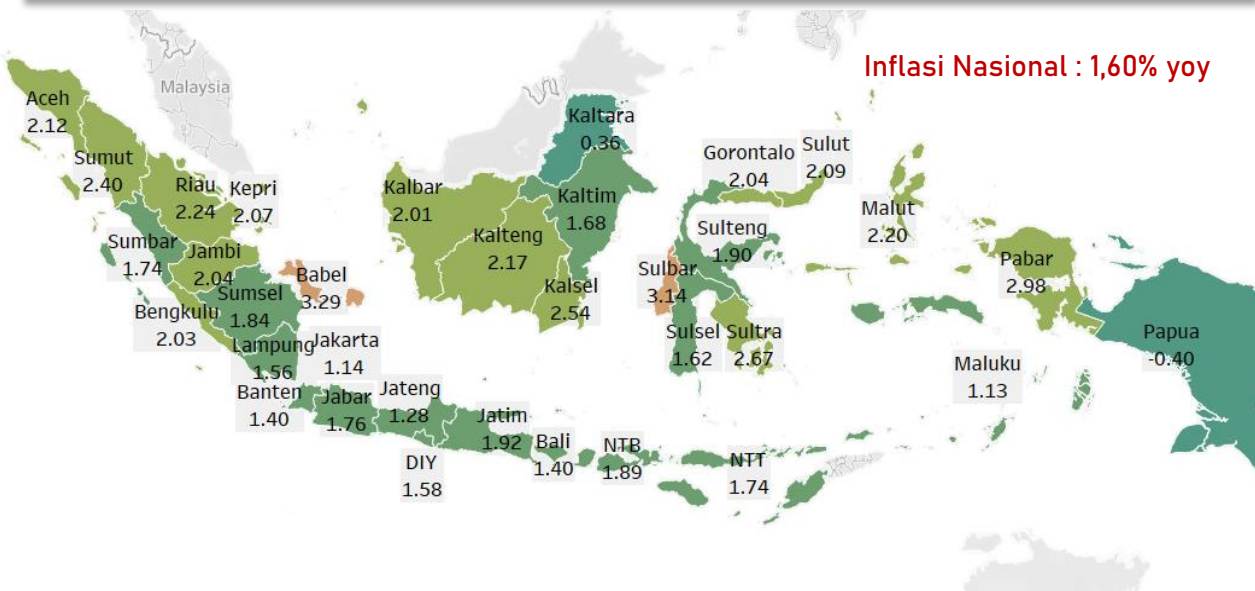
# Inflasi Nasional dan Spasial Masih Terjaga Rendah dan Stabil

- ❑ Pada September 2021 terjadi deflasi sebesar -0,04% (mtm) atau 1,60% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya (1,59% yoy) akan tetapi realisasi inflasi bulan September 2021 masih berada di bawah kisaran sasaran inflasi 2021 (3%±1%).
- ❑ Peningkatan inflasi inti yang masih terbatas menjadi signal bahwa daya beli masyarakat masih terganggu/terbatas ditengah mulai diberlakukannya pelonggaran PPKM di sejumlah daerah.
- ❑ Kebijakan pengendalian inflasi ke depan masih perlu *extra effort* untuk tidak hanya fokus pada stabilitas harga, namun juga mendukung program pemulihan ekonomi utamanya penguatan daya beli masyarakat.



**Inflasi Spasial September 2021 (% yoy)**

**Inflasi Spasial September 2021 (% mtm)**

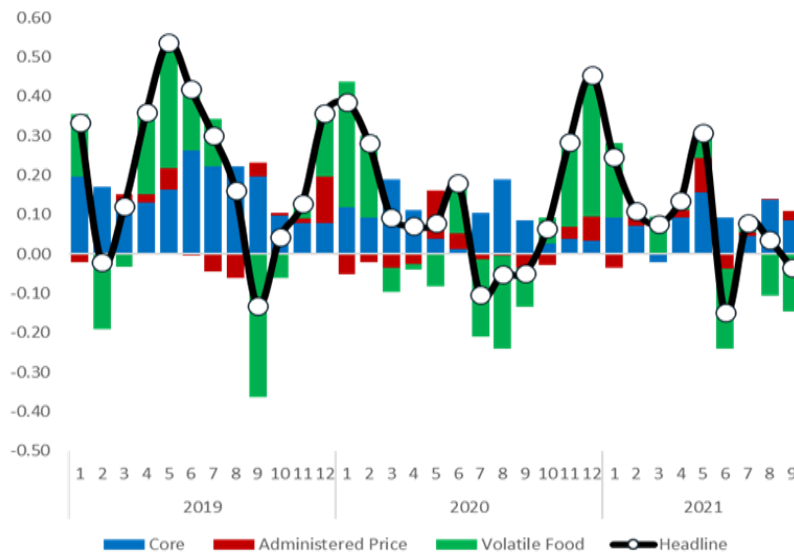


# Tantangan Pengendalian Inflasi di Masa Pandemi:

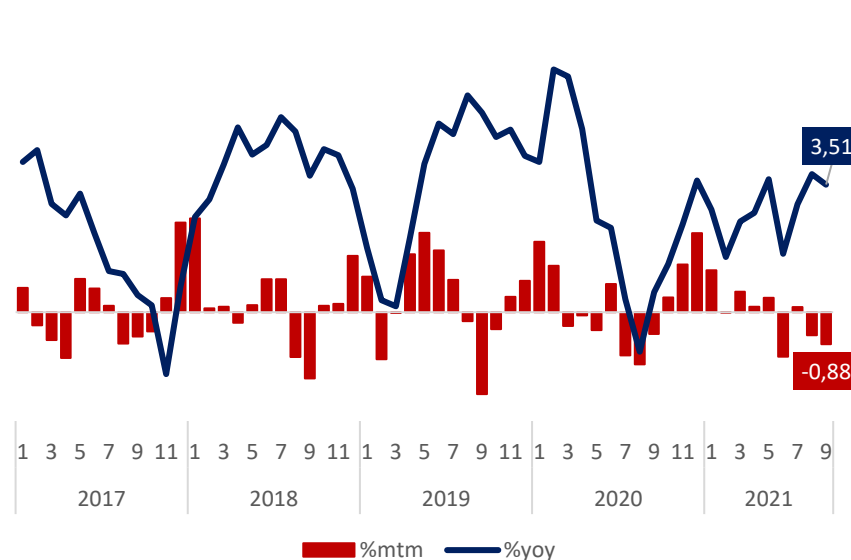
*Inflasi IHK cenderung didrive oleh dinamika/fluktuasi inflasi pangan (VF) ditengah inflasi inti yang melambat serta inflasi AP yang akomodatif*

- Di masa normal, tantangan pengendalian inflasi muncul dari berbagai komponen serta kelompok pengeluaran. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2019 komponen *Administered Price* masih menjadi salah satu penyumbang inflasi, yang biasanya datang dari dinamika berbagai tarif angkutan serta penyesuaian energi. Selain itu, inflasi juga disumbang dari komponen inti dan kelompok pengeluaran turunannya yang cenderung persisten.
- Namun demikian, di masa pandemi di tengah berbagai stimulus kebijakan pemerintah, komponen AP relatif stagnan dan komponen inti pun mengalami periode penurunan yang cukup panjang, terdorong dari kontraksi permintaan selama pandemi.
- Sehingga, dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi selama pandemi cenderung *didrive* oleh komponen inflasi VF. Volatilitas harga pangan sendiri salah satunya dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas hortikultura.
- Dalam hal ini, TPID tentu memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengendalian gejala inflasi pangan melalui berbagai program unggulan dan instrument intervensi yang dimiliki.**

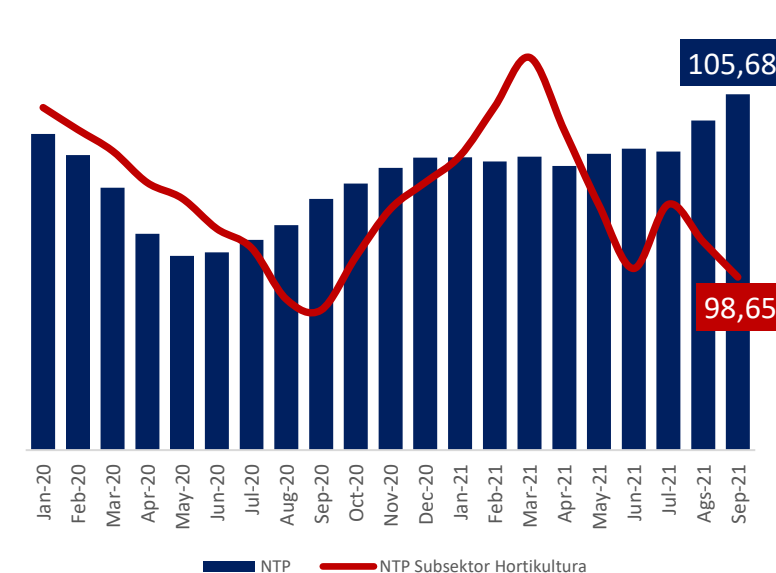
Sumbangan Disagregasi Komponen Inflasi Nasional (% mtm)



Perkembangan Komponen Inflasi Volatile Food



Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura



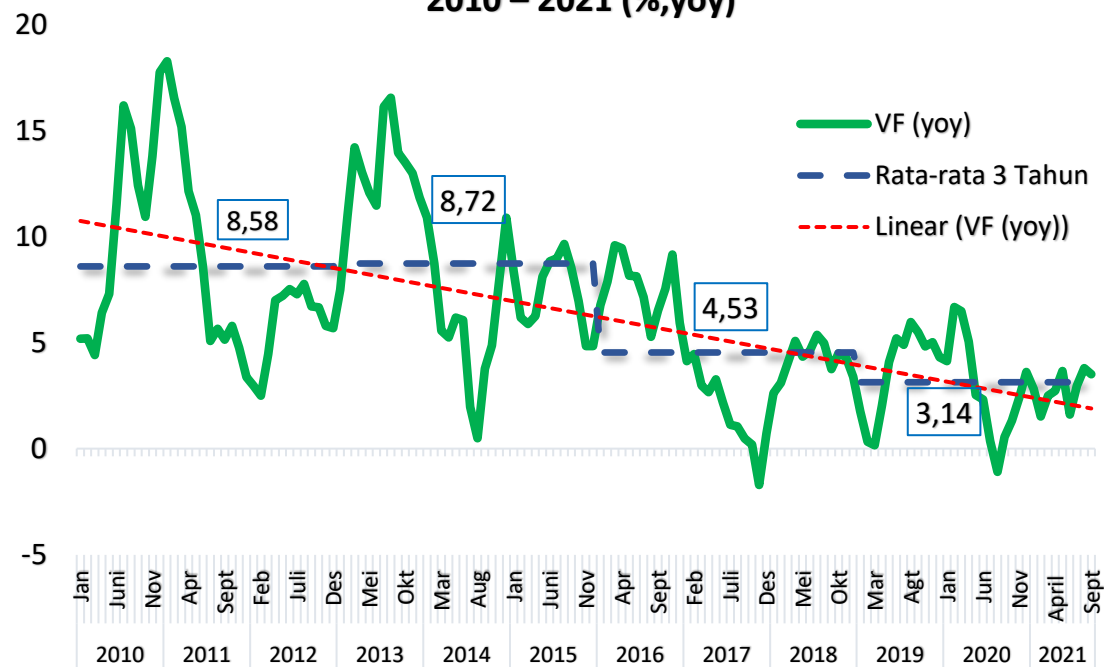
Sumber: BPS, diolah

# Berbagai Kebijakan Struktural Pangan:

## Dalam Upaya Menekan Inflasi Pangan Bergejolak Jangka Panjang

- ❑ Tren inflasi Pangan Bergejolak (VF) terus menunjukkan penurunan, rata-rata inflasi VF 3 tahunan berhasil ditekan dari sebesar 8,58% yoy pada periode 2010 – 2012 menjadi hanya sebesar 3,14% yoy pada 2019 – 2021 atau masih dalam kisaran target 3% s.d 5%.
- ❑ Kebijakan struktural masih perlu diakselerasi dalam rangka menekan inflasi pangan bergejolak (VF) a.l melalui penguatan produktivitas pertanian maupun peningkatan efisiensi melalui infrastruktur distribusi.
- ❑ Dalam jangka pendek, inflasi pangan diarahkan bergerak pada level 3% s.d 5% dengan beberapa langkah intervensi melalui kerangka 4K\*.

Perkembangan Inflasi Pangan Bergejolak  
2010 – 2021 (% ,yoy)



### KEBIJAKAN STRUKTURAL UTK MENEKAN VF JK. PANJANG

#### PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

1. Food Estate
2. Korporatisasi Petani
3. Transformasi Digital Pertanian
4. Infrastruktur Pascapanen
5. Hilirasasi produk pertanian
6. Penguatan CBP
7. Sistem Resi Gudang
8. Perluasan Area Tanam
9. Manajemen Pola Tanam
10. UU Cipta Kerja Kluster Pangan

#### EFISIENSI DISTRIBUSI

1. Pemerataan Infrastruktur Jalan
2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Tol Laut
3. Sistem Logistik Daerah
4. Perluasan Akses Pasar
5. Penanganan pasca bencana

Keterangan:

\* Kesepakatan dalam HLM TPIP 11 Februari 2021



# Arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021

Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan momentum pandemi untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM pangan hulu-hilir

MENDORONG  
PENINGKATAN  
PERAN UMKM  
PANGAN MELALUI  
OPTIMALISASI  
DIGITALISASI  
UNTUK  
MENDUKUNG  
PEMULIHAN  
EKONOMI DAN  
STABILITAS  
HARGA PANGAN

## Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga



Perlu dilakukan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

## Proaktif Mendorong Sektor Ekonomi yang Tumbuh Produktif di tengah Pandemi



Mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan dapat naik kelas

## Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian



Meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

“Pandemi ini adalah kesempatan bagi daerah untuk mendorong UMKM masuk dalam platform digital. Sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran.”



# Tantangan dan Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi Jangka Menengah

## Risiko Inflasi (Upside & Downside Risk)

### Inti

1. Risiko ketidakpastian perekonomian global masih tinggi
2. Kenaikan harga komoditas global impor
3. Peningkatan second round impact VF dan AP
4. Ekspektasi inflasi meningkat seiring pemulihan ekonomi

### Administered Prices

1. Risiko kenaikan harga migas global
2. Reformasi subsidi energi yang lebih tetap sasaran
3. Risiko kenaikan inflasi tarif angkutan seiring peningkatan mobilitas masyarakat

### Volatile Food

1. Risiko ketersediaan pasokan pangan dalam merespon *recovery* permintaan domestik
2. Problem struktural pola tanam dan manajemen impor
3. Gangguan produksi pertanian akibat disinsentif petani
4. Inefisiensi tata niaga pangan

## KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

# K1

KETERJANGKAUAN  
HARGA

- Menjaga daya beli masyarakat (Bansos, subsidi, BLT, dll)
- Penguatan penyaluran KPSH
- Stabilisasi nilai tukar Rupiah
- Percepatan realisasi dan refocusing APBN dan APBD

Menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras) •  
Penguatan Kerjasama antardaerah •  
Korporatisasi Pertanian •

Peningkatan produktivitas via Pembangunan Food Estate •

# K2

KETERSEDIAAN  
PASOKAN

# K3

KELANCARAN  
DISTRIBUSI

- Perluasan pemasaran melalui platform digital
- Inovasi sistem logistik (spt pemanfaatan jalur kereta)
- Pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017)
- Mendorong kemitraan industri dengan petani

Penguatan koordinasi TPIP-TPID •

Perluasan Pemanfaatan PIHPS sbg landasan kebijakan TPID •

Peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan •

# K4

KOMUNIKASI  
EFEKTIF

## Outlook dan Sasaran Inflasi



Sasaran Inflasi  
2021 - 2023

**3±1%**

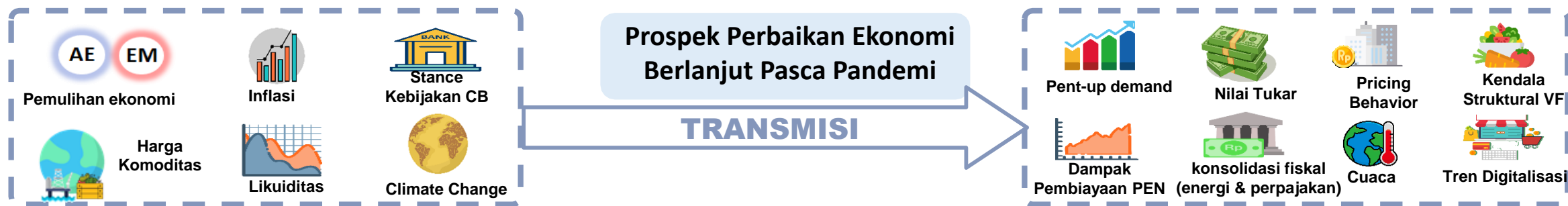
Sasaran Inflasi  
2024

**2,5±1%**

# Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024:

Dirancang untuk Menjawab Tantangan Pengendalian Inflasi Jangka Menengah

Secara khusus TPID Provinsi diharapkan dapat menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi pada tingkat provinsi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah.



**TEKANAN INFLASI MENINGKAT PADA JANGKA MENENGAH**

**PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI 2022 – 2024 : AKSELERASI PERBAIKAN STRUKTURAL DENGAN MENDORONG ADOPSI DIGITAL UNTUK STABILITAS INFLASI DAN PEMULIHAN EKONOMI MENUJU INDONESIA MAJU**

## KETERJANGKAUAN HARGA

## KETERSEDIAAN PASOKAN

## KELANCARAN DISTRIBUSI

## KOMUNIKASI EFEKTIF

Stabilisasi Harga

Mengelola Permintaan

Produksi DN

Eksim

CPP

Kelembagaan

Penguatan KAD

Infra Perdagangan

Kualitas Data

Koor Pus-Da

Ekspektasi

Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Exit Strategy Likuiditas

Digital Farming & Food Estate

Korporatisasi Petani

Model bisnis KAD

Digitallisasi UMKM Hilir

Kebijakan yg menjaga ekspektasi inflasi

**END STATE : TERJAGANYA INFLASI DALAM RENTANG SASARAN 3,0 + 1%, 3,0 + 1%, 2,5% + 1%**



Sumber: Bank Indonesia





# Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (1)

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			PIC
			2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan	Minimal 1x/tahun			Kemendag, Kementan
		2. Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koefisien variasi harga bahan pokok</li> <li>▪ Monitoring wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (i) pertanian pangan 2.9%; (ii) hortikultura 23%; (iii) hasil industri 4.9%; dan (iv) peternakan &amp; perikanan 5.9%</li> <li>▪ Minimal 4x/tahun (termasuk HBKN)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemendag, Kemendagri</li> <li>▪ Satgas Pangan</li> </ul>
		3. Optimalisasi kegiatan KPSH beras	0,8 - 1,3 juta ton per tahun			Bulog
		4. Penetapan kebijakan harga komoditas yg diatur Pemerintah telah dikoordinasikan dgn mempertimbangkan sasaran inflasi IHK dan kondisi fiskal	Rekomendasi kebijakan dgn <i>magnitude</i> , <i>timing</i> , dan <i>sequencing</i> yg terukur			Kemenko, Kemenkeu, ESDM, Kemenhub
		5. Menjaga volatilitas nilai tukar	★	max 15%	max 15%	max 10%
	Mengelola Permintaan	6. Menjaga keseimbangan internal perekonomian	Bauran kebijakan bank sentral dan pemerintah			BI, Kemenko, Kemenkeu
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1. Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyempurnaan bisnis model</li> <li>▪ Penguatan/replikasi pd UMKM binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya model bisnis</li> <li>▪ 5 UMKM</li> <li>▪ 7 UMKM</li> <li>▪ 10 UMKM</li> </ul>			BI
		2. Pengembangan lumbung pangan ( <i>food estate</i> ) melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi pangan/horti</li> <li>▪ Wilayah lumbung pangan di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kentang 40 rb ton, Bawang merah 39,2 rb ton, Bawang putih 7,4 rb ton</li> <li>▪ Kentang 159 rb ton, Bawang merah 118 rb ton, Bawang putih 30 rb ton</li> <li>▪ Beras 1,4 jt ton</li> <li>▪ Sumsel, NTT, dan Papua</li> </ul>			Kementan
		3. Pengembangan kampung hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawang merah</li> <li>▪ Aneka cabai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 400 kampung/tahun</li> <li>▪ 800 kampung/tahun</li> </ul>			Kementan

# Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (2)

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			PIC	
			2022	2023	2024		
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan jaringan irigasi</li> <li>▪ Rehabilitasi jaringan irigasi</li> <li>▪ Penyerapan anggaran PMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80.818 Ha/tahun</li> <li>▪ 137.556 Ha/tahun</li> <li>▪ 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100%</li> </ul>	Kemen PUPR Bulog	
		5. Penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), & Good Manufacturing Practices (GMP): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dgn GAP, GHP, dan GMP</li> </ul>	5%/tahun			Kementan, Kemendagri (Pemda)	
		6. Peningkatan produksi protein hewani	4,59 jt ton	4,64 jt ton	4,70 jt ton	Kementan	
		7. Percepatan swasembada gula, melalui <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan luas lahan tebu</li> </ul>	458.337 Ha	485.524 Ha	509.457 Ha	Kementan	
		8. Peningkatan CPO, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi CPO</li> <li>▪ Produktivitas CPO</li> <li>▪ Perluasan lahan kebun sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 52,9 jt ton</li> <li>▪ 3,85 ton/ha</li> <li>▪ 15.459.163 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 56 jt ton</li> <li>▪ 4 ton/ha</li> <li>▪ 15.845.642 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CPO 59,4 jt ton</li> <li>▪ 4 ton/ha</li> <li>▪ 16.241.783 Ha</li> </ul>	Kementan	
		9. Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan	2,16% (yoy) setiap tahun			Kementan	
		10. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura</li> </ul>	5%/tahun			Kementan	
		11. Penguatan pasokan bahan bakar non BBM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porsi bio diesel dalam campuran BBM</li> </ul>	min. 30%/tahun			Kemen ESDM	
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	12. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beras (CBP)</li> <li>▪ Jagung (CJP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CBP min. 1 juta ton sepanjang tahun</li> <li>▪ Kajian pembentukan CJP yg disempurnakan dan/atau rekomendasi pembentukan CJP</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bulog</li> <li>▪ Kemenko, Bulog, Kementan, Kemenkeu, Kemendag</li> </ul>

# Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (3)

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			PIC
			2022	2023	2024	
Ketersediaan Pasokan	Mekanisme Ekspor Impor	13. Diversifikasi negara asal impor komoditas pangan strategis melalui kerjasama MoU	Chile dan Meksiko	Brazil dan Kolombia	Negara lainnya	<b>Kemendag, Kementan</b>
		14. Penguatan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan	Impor bahan pangan tepat jumlah dan tepat waktu			<b>Kemendag</b>
	Penguatan Kelembagaan	15. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan sawit, dan petani tebu, melalui:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Korporatisasi klaster petani (hortikultura)</li> <li>Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit</li> <li>Mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 klaster</li> <li>10 provinsi</li> <li>7 pabrik gula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 klaster</li> <li>15 provinsi</li> <li>15 pabrik gula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>350 klaster</li> <li>19 provinsi</li> <li>23 pabrik gula</li> </ul>	<b>Kementan</b>
		16. Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	67,13%	67,25%	67,32%	<b>Kementan, Kemenko, Kemendagri, Kemenkeu</b>
		17. Peningkatan transaksi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	9% (SRG) dan 10% (PLK)	12% (SRG) dan 13% (PLK)	14% (SRG) dan 15% PLK	<b>Kemendag, Kemenko</b>
		18. Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas tebu</li> <li>Akuisisi mitra warung pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>76 ton/Ha</li> <li>90 ribu mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>77 ton/Ha</li> <li>120 ribu mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 ton/Ha</li> <li>150 ribu mitra</li> </ul>	<b>Kemen BUMN</b>
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1. Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) 	Kenaikan 10% jumlah KAD; dan/atau penambahan jenis komoditas dan/atau volume transaksi setiap tahun			<b>Kemendagri, BI</b>
		2. Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI): <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi kegiatan</li> <li>Volume penjualan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34 provinsi dan pusat/tahun</li> <li>41.500 ton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>43.000 ton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>44.500 ton</li> </ul>	<b>Kementan</b>
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidi rute AU</li> <li>Penyelenggaraan AL</li> <li>Penambahan jalan mantap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>43 rute AU (41 perintis kargo, 2 subsidi kargo) setiap tahun</li> <li>AL perintis 117 trayek; dan/atau tol laut 34 trayek; dan/atau angkutan kapal ternak (6 trayek)</li> <li>1,18%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,45%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,97%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kemenhub, Kemenko</b></li> <li><b>Kemen PUPR, Kemenko</b></li> </ul>



Usulan Flagship

**Bold PIC adl lead pd proker**

# Rekapitulasi Proker Peta Jalan 2022 – 2024 (4)

4K	Program Strategis	Program Kerja	Timeline Target			PIC
			2022	2023	2024	
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	4. Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas UMKM pangan binaan dgn e-commerce di level nasional maupun daerah</li> <li>▪ Peningkatan volume transaksi PasTani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10%</li> <li>▪ 10%/tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BI</li> <li>▪ Kementan</li> </ul>
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1. Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah	35 lokasi (34 provinsi dan pusat) setiap tahun			Kementan, Kemendagri
		2. Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data pasokan</li> <li>▪ Korelasi data harga dengan inflasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publikasi</li> <li>▪ Min 0.8/tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kesinambungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi dan pemanfaatan utk asesmen</li> </ul>	BI
	Koordinasi Pusat dan Daerah	3. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi nasional	100% TPID provinsi			Kemendagri, Kemenko
		4. Peningkatan kehandalan TPID a.l. melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kehandalan TPID IHK</li> <li>▪ Tingkat kehandalan TPID non IHK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80-90 (median)</li> <li>▪ 40-50 (median)</li> </ul>			Kemenko, Kemendagri, BI
Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	5. Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CF terjaga di kisaran sasaran inflasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3±1%</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.5±1%</li> </ul>	BI



---

**TERIMA KASIH**

**#UntukEkonomiIndonesia**